



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OTTO PARORRONGAN
2. Jabatan : ASISTEN DAERAH BIDANG ADMINISTRASI
3. NHK : 654664

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.295.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/120 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/117 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA SORONG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA SORONG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 211.500.000

1. MOTOR, HONDA NC118F1D A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



2. MOTOR, HONDA Y1Q02N15L0AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 3.500.000
3. MOBIL, FORD FIESTA 1.4L A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000
4. MOBIL, FORD FIESTA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000
5. MOBIL, HONDA CR-V RE12WD 2.0 MT CKD Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 95.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.004.950
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.320.499.559
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.844.004.509
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.844.004.509

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.